**ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH MENURUT PERSPEKTIF FIIQH
MUAMALAH (STUDI KASUS KOLAM PEMANCINGAN IKAN DI PUDE'E
KEL.LOMP OE KEC.BACUKIKI
KOTA PAREPARE)**

Nuringsih

Inchi.syafitri@gmail.com

Nur Azzatul Asmira

Azzatulmira@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perspektif fiqh muamalah terhadap penerapan akad ijarah pada kolam pemancingan ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder dari hasil wawancara dengan pemilik dan pemancing kolam serta dokumentasi melalui literatur-literatur ke pustakaan serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mendalami penelitian terhadap pelaksanaan akad sewa dari awal hingga berakhirnya sewa terdapat unsur yang dapat merusak akad sewa. Karena adanya unsur ketidakjelasan dari hasil yang didapat dalam memancing, antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain. keuntungan masing-masing yang tidak sebanding. Sehingga jika ditinjau dari segi akadnya maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah pada kolam pemancingan ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare tidak sesuai ditinjau dalam fiqh muamalah.

Kata Kunci : Akad Ijarah, Fiqh Muamalah

ABSTRACT

This study discusses the perspective of fiqh muamalah on the implementation of the ijarah contract in the fishing pond in Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki City of Parepare. The type of research used is field research with qualitative research methods. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used was descriptive analysis, with primary and secondary data sources from interviews with pond owners and anglers and documentation through literature to libraries and relevant books. with this research. The result of the research shows that after deep researching the implementation of the lease agreement from the beginning to the end of the lease, there are elements that can damage the lease agreement. Because there is an element of uncertainty about the results obtained in fishing, between one tenant and another. the respective advantages are not comparable. So when viewed in terms of the contract, it can be concluded that the implementation of the ijarah contract in the fishing pond in Pude'e Kel. Lompoe Kec. Reading the city of Parepare is not suitable to be reviewed in muamalah fiqh.

Keywords: Akad Ijarah, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, sehingga setiap manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dapat tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal tukar menukar kebutuhan, jual beli, sewa menyewa (*Ijarah*), pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.¹

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan ijarah, yang dimaksud dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah Mu'amalah.³

Aqidah sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas ummat (akhlak). Aqidah dan akhlak bersifat konstan yang keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berubahnya waktu dan perbedaan tempat. Adapun syariah dibagi menjadi dua yaitu bagian ibadah yang bersifat konstan yakni tidak berubah dan bagian muamalah.⁴

Berdasarkan observasi awal bahwa kolam pemancingan ikan di pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare diperoleh informasi bahwa dengan mengeluarkan uang Rp. 50.000,00 pengunjung dipersilahkan melakukan pemancingan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Pemancing memulai memancing pukul 09:00-17:00 WITA. Ikan yang didapatkan akan menjadi milik pemancing selama masih dalam waktu sewa tanpa ada penimbangan hasil pancingan.

Keberadaan sistem sewa menyewa pada kolam pemancingan ikan di pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang mempunyai hobi memancing. Selain mendapatkan ikan mereka juga merasa puas atau pun merasa terpenuhi kebutuhan rohaninya dengan memanfaatkan fasilitas maupun sistem pemancingan yang diterapkan oleh pengelola Kolam pancing.

Namun dalam praktek sewa yang diterapkan oleh pengelola banyak menimbulkan tanggapan pengunjung (pemancing) yang berbeda-beda dalam menyikapi hal tersebut. Keberadaan sistem yang diterapkan oleh pengelola masih

¹Yusuf Qordhowi, *halal haram dalam Islam, Terjemah H. Muamalah Hamidi*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), h.348.

²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan syariah "Produk-produk dan aspek-aspek Hukumnya"*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.264.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.85.

⁴Mohammad hidayat, *The sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h.30.

menjadi sebuah pertanyaan bagi sebagian besar pengunjung (pemancing). Masyarakat ragu akan prinsip sewa yang diterapkan di kolam pemancingan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki kota parepare tersebut. Dengan sistem sewa yang diterapkan kemungkinan terjadinya kecurangan itu sangat besar, misalnya tentang keberadaan ikannya. Karena akad yang diterapkan yaitu pemancing menyewa kolam dan hasil dari pancingannya (ikan) dibawa pulang. Selain itu kemungkinan kecurangan yang lain yaitu sebelum pengunjung melakukan pemancingan pengelola terlebih dulu memberikan makan ikan yang berlebihan sehingga ketika pengunjung melakukan pemancingan hasil pancingan tidak maksimal.

Sistem pemancingan dengan sistem sewa pun merupakan daya tarik tersendiri, karena sistem tersebut merupakan hal yang jarang ditemui pada tempat pemancingan lainnya. Dengan menerapkan sistem sewa pengelola mengharapkan minat pemancing semakin banyak sehingga sistem tersebut menjadi kekuatan atau daya tarik bagi pemancing untuk melakukan pemancingan di Kolam Pemancingan Ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare. Bertolak dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini lebih dalam.

KAJIAN TEORI

Fiqh Muamalah

Kata muamalat (bahasa arab) yang kata tunggalnya muamalah (bahasa arab) yang berakar pada kata bahasa arab secara arti kata mengandung arti ,saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti Mu'amalah secara etimologi sama dan semakna dengan al- mufa'alah (bahasa arab) yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing. Atau Mu'amalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan⁵.

Secara terminologi, ulama memberikan definisi yang beragam, baik dari segi tujuan maupun cakupannya. Sebagaimana mendefinisikan muamalah dalam arti luas, dan sebagian lain mendefinisikan muamalah dalam artian terbatas. Dalam artian luas, mua'amalat didefinisikan sebagai Hukum -hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalankeduniaan. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Yusuf Musa, bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawidan sosial kemasyarakatan. Namun, ada juga yang mendefinisikan lain, Mu'amalah adalah , kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat⁶.

Tujuan dasar dari Fiqh Mu'amalah adalah untuk mengatur ketertiban bermuamalah. Dalam mengatur persoalan muamalah, Alqur'an dan Sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya, diserahkan kepada para ahlinya. Akibatnya,

⁵Abdul Rahman Ghazly dkk, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), h.3.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,2013), h.102.

dalam aplikasi, pengaturan dalam bidang muamalah terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan.

Ijarah

Dalam ekonomi islam, jasa dikaitkan dengan sewa menyewa (ijarah). Penjualan jasa dalam islam disebut dengan ijarah atau sewa menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan ijarah adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Lafal ijarah berasal dari kata Arab al-ajr yang berarti al-*'iwadh* (ganti) yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Kata ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan, yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁷

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁸Jadi penyewaan (ijarah) atau sewamenyewa menurut Muhammad Syafi'I Antonio adalah suatu perjanjian sewa barang (uang) yangmana dalam masa tunggu penyewa mendapatkan imbalan.

Pembayaran sewa tidaklah bertentangan dengan etika Islam, hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Sewa adalah hasil usaha yang inisiatif dan efisien. Ia dihasilkan sesudah suatu proses menciptakan nilai pasti, karena pemilikan harta benda atau kekayaan tetap terlibat dan berkepentingan dengan seluruh pemakaian si pemakai.
2. Mengenai sewa usaha produktif diperlukan dalam menciptakan nilai, karena upah yang ekonomik dilakukan pemilik modal dengan merubahnya menjadi milik atau kekayaan. Demikian maka unsur kewirausahaan tetap berjalan dan aktif dalam memproduksi barang dan jasa.
3. Dalam hal usaha, pemilik modal sendiri menentukan pola, ukuran dan jenis produk. Karena itu terbatas pada penggunaannya yang pasti dan bertujuan.
4. Dalam beberapa hal sewa menyewa tidak termasuk harga, karena dalam masalah sewa terlalu banyak unsur kerugiannya, maka penggunaan modal si pemilik untuk mendapatkan sewa tidak menciptakan timbulnya kelas bermalas-malas dalam masyarakat.
5. Masalah sewa merupakan suatu hak milik atau penyewaan pada suatu kekayaan lebih mirip dengan gaji dan upah, atau dengan batas laba bruto yang ditentukan oleh pembuat barang atau pedagang atas barangnya atau dengan pembayaran upah yang dikarenakan dalam profesinya.

Dilihat dari segi objeknya, sewa-menyewa (*ijarah*) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan

⁷Idris, *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi "*,(Jakarta: Prenadamedia Group,2015), h.231.

⁸Abdul Rahman Ghazly dkk, *Fiqih Muamalah*. h.278.

(jasa). Sewa menyewa yang bersifat manfaat, misalnya sewa-menyewa tanah untuk pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa menyewa semacam ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, sewa menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam dan ada juga yang bersifat serikat, seperti menggaji buruh pabrik, buruh bangunan, dan sebagainya.⁹

Pelaksanaan dan tanggung jawab waktu ijarah sebagai berikut :

- 1) Nilai harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu
- 2) Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun
Dalam penentuan waktu ijarah tidak ada batas, karena ijarah hukumnya sah baik dalam waktu yang panjang maupun pendek. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama syafi'iyah dalam pendapat yang shahih. Masa penyewaan tidak ada batasan terlamanya karena tidak ada ketentuannya, dalam syar'i.¹⁰

Pengembalian barang sewaan dalam KHES bab Ijarah bagian kedelapan pengembalian Ma'jur

- 1) Cara pengembalian ma'jur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad
- 2) Bila cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian ma'jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan.

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Bada'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa *akad ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- 3) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- 4) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *ijarah* nya batal.

⁹Idris, *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi "*. h.241.

¹⁰ Wahbab Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5 h.391

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.¹¹

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dalam fakta yang sebenarnya, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang didapat dari sumber lokasi penelitian, atau responden yaitu kolam pemancingan ikan di pude'e. Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, adalah suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari penelitian ini dengan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku. Adapun penelitian ini dilakukan di kolam pemancingan ikan di pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki kota Parepare.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menerangkan gejala yang diteliti serta menerangkan latar belakang yang menimbulkan gejala dari keadaan tersebut untuk dapat dianalisa dan dilakukan pemecahan masalah berdasarkan gambaran yang dilihat dan diamati dari hasil penelitian teori berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan¹². Dalam penelitian ini dianalisis tentang penerapan akad ijarah menurut perspektif fiqh muamalah di kolam pemancingan ikan di pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki kota parepare.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah sumber data yang pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian, meliputi: hasil wawancara dengan pemilik dan pengelola kolam ikan Pude'e dan hasil wawancara dengan penyewa atau pengunjung kolam ikan Pude'e. sementara data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah Analisis fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa (ijarah).

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Interview (wawancara) dan Studi Dokumentasi. Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu

¹¹Abdul Rahman Ghazly dkk, *Fiqh Muamalah*. h.284.

¹²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1994), h.3

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Analisis deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui tentang penerapan akad ijarah kolam ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare ditinjau dari prespektif fiqih muamalah.

HASIL

Keberadaan kolam pemancingan ikan pude'e Kota Parepare memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang mempunyai hobi memancing. Selain mendapatkan ikan mereka juga merasa puas atau pun merasa terpenuhi kebutuhan rohaninya dengan memanfaatkan fasilitas maupun sistem pemancingan yang diterapkan oleh pengelola Kolam pancing.

Sistem pemancingan dengan sistem sewa pun merupakan daya tarik tersendiri, karena sistem tersebut merupakan hal yang jarang ditemui pada tempat pemancingan lainnya. Dengan menerapkan sistem sewa pengelola mengharapkan minat pemancing semakin banyak sehingga sistem tersebut menjadi kekuatan atau daya tarik bagi pemancing untuk melakukan pemancingan di Kolam Pemancingan Ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare.

Namun dalam praktek sewa yang diterapkan oleh pengelola banyak menimbulkan tanggapan pengunjung (pemancing) yang berbeda-beda dalam menyikapi hal tersebut. Keberadaan sistem yang diterapkan oleh pengelola masih menjadi sebuah pertanyaan bagi sebagian besar pengunjung (pemancing). Masyarakat ragu akan prinsip sewa yang diterapkan di kolam pemancingan pude'e kota parepare tersebut. Dengan sistem sewa yang diterapkan tersebut perlu adanya tinjauan dalam perspektif fiqih muamalah. Berikut akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini.

Gambaran penerapan akad ijarah pada kolam pemancingan ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare

Berikut akan diuraikan hasil dari pembahasan dalam hal ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari pemilik kolam pemancingan ikan di Pude'e dan pemancing atau penyewa. Dalam pembahasan pertama ini akan menjawab dari rumusan masalah yang pertama.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akad penyewaan kolam pemancingan di Pude'e termasuk penyewaan (*ijarah*). Karena merupakan akad yang memberi manfaat (faedah) yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan pergantian. Dalam pihak ini, dibutuhkan dua pihak yaitu pihak penyewa yang wajib memberikan upah (*Ujrah*) dan pihak yang menyewakan menyerahkan manfaat dari obyek yang disewakan yaitu ikan hasil pancingannya, maka dari akad tersebut timbulah suatu hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak penyewa dan yang menyewakan.

Untuk mengetahui penerapan akad ijarah pada kolam pemancingan ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare, peneliti mengajukan beberapa

pertanyaan kepada pemilik pemancingan dan beberapa pemancing yang sedang memancing.

Hukum Islam mempunyai metode yang sempurna untuk melaksanakan sebuah transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bermuamalah yang selalu diaplikasikan adalah dua transaksi dua pihak yang terdapat unsur suka sama suka. Hingga terjadinya perjanjian yang sah. Untuk sahnya suatu perjanjian kerja dalam Islam, harus memenuhi beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka sudah jelas bahwa objek sewa menyewa dalam hal ini adalah kolam pemancingan. Dalam akad sewa menyewa ini objek (kolam pemancingan) dan barang harus adamanfaatnya, dimana manfaat tersebut harus sesuai dengan ketentuan syara', yaitu manfaat barang tersebut tidak untuk kemaksiatan, selain itu obyek penyewaan harus jelas sesuai dengansyara'.

Kehalalan suatu benda yang dijadikan sebagai obyek yaitu kolam pemancingan, dalam kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Yaitu obyek atau kegiatan tidak termasuk dalam kategori yang terlarang, begitupun halnya dalam sewa menyewa.

Berdasarkan wawancara tersebut maka diketahui bahwa pembayaran dalam sistem penyewaan harian ini sangat jelas, karena adanya kesamaan harga yaitu Rp 50.000 perhari pada setiap penyewa atau pemancing yang memilih penyewaan harian, namun adanya kesamaan atau ketidakjelasan harga yang didapat muncul ketika melihat manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbedan namun harga sewa yang sama. Yaitu pendapatan ikan yang didapat dalam memancing, membuat unsur ketidakjelasan (*gharar*) nampak jelas di dalamnya. Ketidakjelasan (*gharar*) dalam hal sistem penyewaan harian ini dinyatakan tidak sah dalam syarat sah penyewaan (*ijarah*), meskipun ada kesepakatan antara pemilik kolam dan penyewa kolam di pemancingan Pude'e.

Waktu dalam obyek penyewaan kolam pancing ini dalam sistem penyewaan harian ini jelas satu hari yaitu mulai dibukanya kolam pemancingan sampai ditutup, atau pukul 07.00 sampai 17.00 WIB. Dalam perjanjian ini terdapat sistem yaitu sistem penyewaan harian, dimana para pemancing berhak memilih berdasarkan keinginannya, apabila telah tercapai kata sepakat, maka ijab qabul telah terlaksana. Apabila penyewa memilih sistem penyewaan harian maka pembayarannya harus terlunas dahulu baru para penyewa atau pemancing dapat mengambil manfaat atas sewa tersebut dengan membayar per hari sebesar Rp. 50.000- .

Pelaksanaan memancing pada kolam pemancingan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare adalah pelaksanaan memulainya memancing setelah akad ijarah dilaksanakan. Dalam hal ini pelaksanaan pemancingan yang diterapkan oleh ibu Hj. Matri di tempat pemancingannya, para penyewa atau pemancing boleh memilih tempatnya masing-masing sesuai keinginannya. Kolam yang sudah disediakan terdapat 3 kolam dan pemancing dibolehkan untuk memancing di kolam manapun. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Syufriadi salah satu pemancing atau penyewa di kolam ini,

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa pada pemancingan kolam di Pude'e menggunakan sistem sewa seharian. Hal ini sangat menarik bagi masyarakat karena dengan adanya waktu yang panjang dalam memancing membuat penyewa atau pemancing puas. Namun dengan sistem sewa seharian mengakibatkan hanya menguntungkan satu pihak saja karena lama proses sewa dan harga bisa saja tidak lagi senilai dan sebanding apalagi jika penyewa atau pemancing mendapatkan banyak ikan maka sangat merugikan pemilik kolam.

Berdasarkan hal tersebut maka terjadi ketidaksesuaian pembayaran sewa menyewa, kalau penyewa mendapat banyak ikan maka merugikan pemilik kolam begitupula sebaliknya jika penyewa tidak mendapatkan ikan atau sedikit ikan maka merugikan penyewa atau pemancing tersebut sehingga terjadi penyimpangan dalam prakteknya. Dan akibatnya dapat membatalkan proses akad karena terjadi unsur yang tidak jelas dalam praktek sewa menyewa pada pemancingan kolam di Pude'e.

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, Adapun yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*ijarah*) ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.

Dalam sewa menyewa, tidak terlepas dari syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa menyewa. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi dalam sewa menyewa dalam Islam telah ditentukan oleh para ulama dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.

Dalam pelaksanaan pembayaran upah penyewa atau pemancing harus membayarkan uangnya di awal atau setelah terjadinya akad. Dan sistem penyewaan kolam pemancingan ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare dalam hal ini dibenarkan karena pembayaran dalam sewa menyewa itu sesuai dengan kesepakatan para pihak sesuai dengan aturan hukum *ijarah* yaitu jasa penyewaa dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan serta *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek *ijarah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Dalam ushul fiqh dijelaskan kebebasan atau hak untuk memiliki sebuah barang, merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan. Karena hal itu termasuk perbuatan yang di perbolehkan. Dari itulah Nabi Muhammad, menghususkan kebebasan umum dalam muamalah. Sebuah kebebasan dalam berkontrak tidak serta merta bebas dari ketentuan syara'.

Pada sistem persewaan pemancingan kolam ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare ini adalah persewaan atau sewa menyewa yang berupa obyek kolam pemancingan yang bersifat manfaat. Dimana dalam hal ini terdapat

sistem penyewaan harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama Rp. 50.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewayang lain berbeda.

Setelah mendalami dan peneliti melakukan penelitian terhadap penerapan akad sewa dari awal hingga berakhirnya sewa terdapat unsur yang dapat merusak akad sewa. Karena adanya unsur ketidak jelasan dari hasil yang didapat dalam memancing, antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain. keuntungan masing-masing yang tidak sebanding. Sehingga jika ditinjau dari segi akadnya maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah pada kolam pemancingan ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare tidak sesuai ditinjau dalam fiqh muamalah.

KESIMPULAN

1. Pada sistem persewaan pemancingan kolam ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare ini adalah menggunakan sitem akad ijarah. persewaan atausewa menyewa yang berupa obyek kolam pemancingan yang bersifat manfaat. Dimana dalam hal ini terdapat sistem penyewaan harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama Rp. 50.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewayang lain berbeda. Kemudian penyewaan kolam ikan menggunakan sistem sewa harian yang mengakibatkan keuntungan satu pihak saja
2. Berdasarkan hasil penelitian, ketika melihat penerapan yang belum seluruhnya dipenuhi dalam pelaksanaan dan syarat akad sewa menyewa pemancingan maka penerapan tersebut belum dapat dibenarkan. Meskipun penerapan akadnya tidak memiliki unsur-unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak. Selain itu, penerapan akad dilakukan orang-orang yang sudah dewasa ataupun baligh. Tetapi, pada dasarnya muamalah hukumnya adalah boleh kecuali mengandung unsur-unsur yang dapat merusak akadnya sendiri. Setelah mendalami dan peneliti melakukan penelitian terhadap penerapan akad sewa dari awal hingga berakhirnya sewa terdapat unsur yang dapat merusak akad sewa. Karena adanya unsur ketidak jelasan dari hasil yang didapat dalam memancing, antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain. keuntungan masing-masing yang tidak sebanding. Sehingga jika ditinjau dari segi akadnya maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah pada pemancingan kolam pemancingan ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare tidak sesuai ditinjau dalam fiqh muamalah.

REFERENSI

- Adam, Panji, *Fikih muamalah Maliyah*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Azhar basyr, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Jogjakarta: UII, 1990.
- Elmiyatin, Atik, *Praktek Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian dan Kiloan di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cere Kab. Gresik*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Hidayat, Mohammad, *The sharia Economic*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

- Idris, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Pangkas Abdilla, Muhammad, *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2012.
- Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Rahman Ghazly, dkk, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.